

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian tentang implementasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generasi Berikutnya (SIKS-NG) di Dinas Pelayanan Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III, yang mencakup empat indikator: komunikasi, sumber daya, kemauan, dan struktur birokrasi. Berdasarkan analisis data yang diperoleh selama penelitian, beberapa kesimpulan dapat ditarik sebagai berikut.

1. Komunikasi

Komunikasi dalam implementasi aplikasi SIKS-NG di Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan telah berjalan cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya sosialisasi, bimbingan teknis, rapat koordinasi, serta komunikasi melalui media daring antara Dinas Sosial dengan operator desa. Informasi mengenai tujuan, sasaran, dan target implementasi aplikasi telah dipahami oleh sebagian besar pelaksana sehingga proses pendataan dan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dapat dilaksanakan sesuai prosedur.

Namun demikian, efektivitas komunikasi masih menghadapi beberapa kendala, seperti tingginya pergantian operator desa, perubahan sistem aplikasi dari Kementerian Sosial, serta belum meratanya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme pengusulan dan pembaruan data bantuan sosial. Oleh karena itu,

komunikasi kepada operator baru maupun masyarakat masih perlu ditingkatkan agar implementasi aplikasi dapat berjalan lebih optimal.

2. Sumber Daya

Sumber daya dalam implementasi aplikasi SIKS-NG telah mendukung pelaksanaan kebijakan, namun belum sepenuhnya optimal. Dari aspek kompetensi sumber daya manusia, operator kabupaten telah memiliki kemampuan yang cukup baik dalam mengoperasikan aplikasi SIKS-NG. Akan tetapi, kompetensi operator desa masih belum merata karena sering terjadi pergantian operator, sehingga membutuhkan pembinaan dan pelatihan secara berkelanjutan.

Dari aspek finansial, pemerintah telah menyediakan dukungan anggaran operasional untuk mendukung implementasi aplikasi. Namun keterbatasan anggaran masih dirasakan terutama dalam kegiatan verifikasi lapangan, monitoring, pembinaan operator desa, serta pemberian insentif kepada operator desa. Kondisi tersebut mempengaruhi efektivitas pelaksanaan implementasi aplikasi SIKS-NG.

3. Disposisi

Disposisi pelaksana dalam implementasi aplikasi SIKS-NG tergolong baik. Pelaksana menunjukkan komitmen yang tinggi dalam melaksanakan tugas meskipun menghadapi berbagai keterbatasan. Selain itu, operator telah berupaya menjaga kejujuran dalam proses verifikasi dan validasi data dengan berpedoman pada hasil survei lapangan serta ketentuan yang berlaku.

Dari aspek demokratis, pemerintah desa dan operator telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengusulkan perubahan data maupun menyampaikan keberatan terhadap hasil pendataan. Akan tetapi, masih terdapat sebagian masyarakat yang belum memahami mekanisme tersebut sehingga diperlukan peningkatan sosialisasi agar partisipasi masyarakat dapat berjalan lebih efektif.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dalam implementasi aplikasi SIKS-NG telah berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menjadi pedoman pelaksanaan seluruh tahapan pengelolaan data serta pembagian tugas dan kewenangan yang jelas antara pemerintah desa, operator desa, Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan, dan Kementerian Sosial.

Meskipun demikian, koordinasi antar pelaksana masih memerlukan peningkatan, terutama ketika terjadi pergantian operator desa dan pembaruan sistem aplikasi. Selain itu, masih terdapat masyarakat yang belum memahami batas kewenangan masing-masing instansi sehingga sering terjadi kesalahpahaman mengenai proses penetapan penerima bantuan sosial.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan diharapkan dapat meningkatkan kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, dan pendampingan kepada operator desa

secara berkala, terutama bagi operator yang baru diangkat. Selain itu, koordinasi antara Dinas Sosial dengan pemerintah desa perlu terus diperkuat agar setiap perubahan kebijakan maupun pembaruan aplikasi dapat segera dipahami oleh seluruh pelaksana.

2. Pemerintah desa diharapkan lebih aktif memberikan informasi kepada masyarakat mengenai mekanisme pendataan, verifikasi, validasi, dan pembaruan data melalui aplikasi SIKS-NG. Pemerintah desa juga perlu memastikan bahwa operator desa memperoleh dukungan fasilitas kerja yang memadai sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara optimal.

3. Operator SIKS-NG diharapkan terus meningkatkan kompetensi melalui pelatihan, pembelajaran mandiri, serta mengikuti setiap perkembangan sistem aplikasi yang diterbitkan oleh Kementerian Sosial. Operator juga diharapkan tetap menjaga integritas, profesionalisme, dan objektivitas dalam proses pengelolaan data sehingga kualitas data DTSEN tetap terjaga.

4. Kementerian Sosial diharapkan terus melakukan penyempurnaan sistem aplikasi SIKS-NG agar lebih mudah digunakan oleh operator di daerah. Selain itu, diperlukan peningkatan pembinaan teknis, penyediaan petunjuk operasional yang mudah dipahami, serta penguatan infrastruktur sistem agar perubahan aplikasi tidak menimbulkan kendala dalam proses pelayanan di daerah.

5. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan pada Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan dengan menggunakan pendekatan kualitatif berdasarkan teori implementasi kebijakan George C. Edward III. Peneliti

selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian dengan menggunakan teori implementasi lainnya, menambahkan indikator evaluasi pelayanan publik, atau membandingkan implementasi aplikasi SIKS-NG di beberapa kabupaten/kota sehingga diperoleh hasil penelitian yang lebih komprehensif.

